

BAB IV

STRATEGI IRAN DALAM MENGATASI SANKSI EMBARGO

Iran tidak diam begitu saja menerima sanksi embargo minyak dari Amerika Serikat. Iran melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dan mengurangi dampak buruk bagi perekonomian negaranya. Dalam mengatasi permasalahan sanksi embargo minyak Amerika Serikat, Iran melakukan beberapa strategi yaitu konfrontatif dan akomodatif. Strategi konfrontatif dilakukan Iran dengan beberapa upaya yaitu melakukan kegiatan ekspor minyak ke Cina, India, dan sejumlah negara-negara di Asia, pengurangan pemasokan minyak ke negara-negara yang terlibat dalam sanksi embargo, dan penutupan selat hormuz. Dengan langkah ini Iran percaya akan terus meningkatkan perekonomian Iran, dan mampu mengimbangi situasi perekonomian Iran yang sedang memburuk setelah resmi dijatuhkan sanksi embargo minyak.

Selanjutnya, strategi akomodatif dilakukan Iran untuk mencapai tujuannya yaitu dengan upaya diplomasi kepada negara-negara lain dan Dewan Keamanan PBB menjadi prioritas untuk mengatasi permasalahan ini. Tentunya, diplomasi yang diupayakan Iran ini dipercaya akan mampu membuat situasi perekonomiannya akan lebih baik dan kembali stabil.

A. Strategi Konfrontatif

1. Melakukan Eskpor Minyak di Kawasan Asia

Strategi Iran dalam mengatasi keterpurukan pasca diberlakukan sanksi embargo oleh Amerika Serikat yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekspor Iran ke negara-negara di kawasan Asia. Iran merubah haluan untuk tidak lagi melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan sekutu yang terlibat dalam penerapan sanksi terhadap Iran. Iran terus memperkuat kegiatan ekspor energinya dengan melakukan kegiatan ekspor minyak ke Cina, India, dan sejumlah negara Asia lainnya, dengan begitu Iran percaya bahwa ekspor ini akan membawa ke situasi perekonomian yang lebih baik.

Sejumlah negara-negara di Asia masih banyak yang membeli minyak dari Iran, diketahui ada sekitar empat negara yang terus melakukan pembelian minyak terbesar; Cina, India, Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut tetap melakukan impor minyak dari Iran karena kebutuhan mereka terhadap bahan minyak tersebut. Sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak mempengaruhi sikap mereka dan tetap melakukan impor minyak dari Iran. Misalnya, negara Cina yang sejak awal sudah menunjukkan sikap tidak setuju atas diberlakukannya embargo minyak oleh Amerika Serikat hingga sampai saat ini Cina dengan secara terang-terangan akan tetap melanjutkan impor minyak dari Iran (Global, 2012). Tentunya sikap Cina ini sangat disambut baik oleh Iran, kemudian sikap tersebut juga diikuti beberapa negara diantaranya India. Selanjutnya, Jepang dan Korea Selatan sempat mengungkapkan untuk

mengurangi pasokan minyak dari Iran, tetapi sampai saat ini masih terus melakukan impor minyak dari negara para mullah ini.

Selanjutnya, dilansir dari sebuah media elektronik menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang akan terus melakukan impor minyak dari Iran dengan volume lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi yang sama dari Korea Selatan, setelah resmi nya dicabut dan tercapainya sebuah kesepakatan tentang sanksi embargo minyak terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Dari laporan pemerintahan Korea Selatan menunjukkan bahwa impor minyak mentah Korea Selatan dari Iran meningkat hingga lebih dari dua kali lipat pada kuartal. Hal ini didorong oleh penghapusan sanksi internasional terhadap Iran (Analisa, 2016).

Secara umum, Iran mendapatkan keuntungan yang besar dari strategi nya untuk melakukan ekspor minyak ke negara-negara di Asia. Keberhasilan ini semakin meningkat, dapat dilihat dari terus meningkatnya ekspor minyak ke Asia terlebih lagi setelah tercapainya perjanjian nuklir antara Iran dan kelompok 5+1 serta penghapusan sanksi terhadap Iran (Indonesian, 2016). Dengan begitu, seiring berjalannya waktu situasi ekonomi yang terpuruk pasca diberlakukannya sanksi embargo oleh Amerika Serikat akan terus membaik. Kegiatan ekspor Iran ke kawasan Asia sangat memberikan dampak positif yang luar biasa dalam kebangkitan Iran diatas tekanan sanksi Amerika Serikat.

2. Pengurangan Pemasokan Minyak

Menanggapi sanksi embargo minyak yang dilakukan Amerika Serikat serta dampaknya yang sangat buruk, Iran mencoba mengambil tindakan pencegahan terhadap musuh-musuhnya karena kepentingan nasionalnya terancam. Iran menghadapi tekanan Internasional yang terus meningkat dan isolasi atas aktivitas nuklir yang dilakukan. Menghadapi ancaman tersebut, Teheran mengancam akan membalas dengan mengurangi pasokan minyak ke Amerika Serikat dan negara-negara sekutu, dimana di tengah pusaran krisis finansial Eropa saat itu dalam keadaan krisis, sejumlah perusahaan-perusahaan raksasa energi di kawasan itu sangat mengkhawatirkan nasib kilang minyak di negara-negara tersebut ketika pasokan minyak dari Iran dihentikan total. Tentunya pengurangan pasokan ini akan memberikan dampak buruk bagi negara-negara yang melakukan sanksi embargo kepada Iran.

Para pengamat ekonomi juga menilai dengan adanya perubahan pasokan minyak pengganti Iran akan menelan biaya yang sangat besar. Perubahan dan perbaikan terkait minyak Eropa yang dibangun untuk proses penyulingan minyak mentah Iran akan menelan dana cukup besar. Besarnya dana tersebut tentunya akan menimbulkan kesulitan lebih besar bagi negara-negara di kawasan Eropa. Selanjutnya, menurut pandangan para Analis ekonomi bahwa negara-negara Eropa akan mengalami kesulitan dalam menghadapi resiko pahit dalam ekonomi akibat sanksi minyak terhadap Iran di tengah memburuknya perekonomian di benua itu.

Melihat salah satu kondisi negara yaitu Yunani yang tidak memiliki pemerintah sejak pemilu semakin membuat cemas negara tersebut akan terus memburuk kondisi perekonomiannya. Itu terlihat dari sanksi yang dipaksakan Uni Eropa untuk berhenti memasok minyak Iran justru merugikan negara-negara dikawasan itu, dimana negara seperti Yunani sedang mengalami krisis, sangat bergantung pada minyak Iran. Sehingga, ketika Amerika Serikat dan sekutu melakukan sanksi embargo minyak, Yunani akan semakin sulit dan mengalami kekurangan kebutuhan minyak. Berdasarkan data dari badan energi internasional, pada tahun 2010 Uni Eropa mengimpor sebesar 212,749 juta barrel minyak mentah dari Iran atau mencapai sebesar 5,66 persen dari total Impor Minyak mentah UE. Dari jumlah tersebut, sebesar 14,6 persen di antaranya diimpor oleh Spanyol, disusul Yunani (14 persen) dan Italia (13,1 persen) yang tetap mengimpor minyak dari Iran meskipun sudah ada larangan dari Uni Eropa untuk mengimpor minyak dari Iran, dari 3 negara tersebut Yunani satu-satunya Negara yang masih melakukan impor minyak dari Iran.

Dengan pengurangan pemasokan minyak yang dilakukan Iran tidak membuat negara Amerika Serikat dan sekutunya diam. Seperti halnya negara Uni Eropa sedang bersiap dan mencari pemasok baru yang bisa memberikan berbagai kemudahan sebagaimana diberikan Teheran kepada ketiga negara yang memasok minyak Iran. Kontak sedang dilakukan Negara-negara tersebut dengan Arab Saudi dan juga diharapkan Libya juga dapat terus meningkatkan produksinya sehingga bisa membantu Uni Eropa. Amerika Serikat dan Negara-negara sekutu kini berharap pasokan minyak dari Arab Saudi. Menurut Iran, sanksi yang dikeluarkan

Amerika Serikat dan sekutu tidak akan berpengaruh terhadap ekonominya karena banyak konsumen yang butuh pasokan minyak dari negaranya seperti negara-negara Asia.

3. Penutupan Selat Hormuz

Sebelum Amerika Serikat menjatuhkan embargo minyak, ada banyak sekali yang dilakukan Iran, berbagai upaya diplomasi telah dilakukan bahkan hingga saati ini. Namun seperti sia-sia saja kedua belah pihak yang berunding masih terus menunjukkan kekuatan dan keegoisannya untuk bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Mereka masih saling mencurigai sehingga belum menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Sampai sekarang upaya diplomasi Iran dengan negara-negara barat terus dilakukan namun banyak yang tetap pesimis dengan perundingan tersebut. Pasalnya, hal ini terus menerus terjadi tapi ujung-ujungnya gagal karena kedua belah pihak masih tetap mempertahankan kepentingannya. Kabar terakhir perundingan akan dilakukan kembali, namun menurut Menlu Iran Ali Akbar Salehi, jika perundingan gagal total maka konfrontasi adalah pilihan terakhir.

Oleh karena itu, penutupan selat hormuz ini menjadi salah satu startegi Iran dalam mengatasi sekaligus mempertahankan situasi perekonomiannya di atas tekanan sanksi Amerika Serikat. Rencana ini sangat berpotensi akan dilakukan oleh Iran, itu semua didukung juga oleh anggota parlemen. Ada sekitar 120 dari 290 anggota parlemen Iran telah menandatangani draf rancangan undang-undang dalam upaya blokade selat Hormuz (Kompasiana, 2012). Penutupan Selat Hormuz ini juga merupakan strategi defensif yang dilakukan Iran untuk menghadapi

banyak nya tekanan dari negara-negara Barat, salah satu nya Amerika Serikat yang berupaya akan melemahkan rencana program nuklir Iran (Ika, 2012).

Ketegangan internasional dan berbagai tekanan terus datang terhadap program nuklir yang dikembangkan Iran dan semakin meningkat sejak negeri para Mullah ini terus melakukan peningkatan teknologi pengayaan uranium. Iran juga disebut-sebut telah siap membalas negara-negara yang menerapkan sanksi ke negara-negara barat yang menjatuhkan sanksi embargo kepada Iran, termasuk memboikot pengiriman minyak. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutu, timbul karena adanya tuduhan terhadap Teheran tentang upaya dan usaha untuk membuat senjata nuklir melalui program pengayaan uraniumnya, tentunya tuduhan itu dibantah dengan tegas oleh Republik Islam tersebut. Amerika Serikat dan negara sekutu telah memperluas sanksi terhadap Iran hingga membidik ekspor minyaknya, jalur kehidupan ekonomi negara Persia itu. Tindakan tersebut memicu ancaman dari Iran untuk menutup Selat Hormuz, salah satu jalur paling penting bagi pengiriman minyak di dunia.



Gambar 1.2

Selat Hormuz merupakan jalur laut yang vital, banyak dilewati oleh setidaknya 40% produksi minyak bumi dari timur tengah ke seluruh penjuru dunia. Selat Hormuz merupakan wilayah yang menjadi kontroversi antara Iran dan Uni Emirat (Hanan, 2012). Teluk Persia dan Selat Hormuz yang memiliki peran sangat penting bagi dunia karena letaknya yang begitu strategis untuk menjamin stabilitas keamanan dan pasokan minyak sekaligus menentukan stabilitas harga minyak dunia. Akan tetapi stabilitas tersebut terancam atau terganggu seiring dengan meningkatnya eskalasi “perang urat syaraf” antara Iran dan AS, maupun sekutunya Uni Eropa.

Ancaman yang dilakukan oleh Iran dengan menutup selat Hormuz bukan tidak mungkin dapat mengganggu stabilitas perdagangan minyak dunia. Akibat dari ancaman penutupan atau pun pemblokiran Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran sebagai balasan karena Iran yang dikenakan sanksi berupa embargo minyak pada tahun 2012 oleh Amerika Serikat.

Dampak yang mungkin terjadi jika Iran melakukan penutupan Selat Hormuz adalah berpotensi terjadi krisis minyak yang akan dialami oleh banyak negara-negara didunia, mengurangi pasokan minyak dan gas alam cair dapat mengganggu stabilitas harga minyak dunia bahkan stabilitas perekonomian dunia dipastikan akan terganggu akibat dari ditutupnya Selat Hormuz, sebagai lalu lintas minyak dunia. Karena sumber energi minyak dan gas merupakan kebutuhan utama dalam pembangunan industri-industri kecil di negara berkembang.

Sikap Iran yang mencoba menutup Selat Hormuz tentunya memancing reaksi dari Amerika Serikat dan sekutu. Mereka tidak diam melihat sikap Iran tersebut. Upaya-upaya pun dilakukan oleh Amerika Serikat untuk tetap bertahan dari sikap Iran ini. Pangkalan armada laut kelima milik Amerika Serikat yang berbasis di Bahrain mengambil posisi siaga satu. Amerika Serikat memandang sikap Iran ini sangat berbahaya karena dapat diartikan sebagai pernyataan provokatif dan perang akibat menggelar latihan perang di perairan Internasional dan berhadapan dengan posisi negara lawan.

Sikap Iran tersebut jika benar-benar terjadi akan berdampak dan kemungkinan terjadinya kericuhan di kawasan regional (negara-negara Teluk) yang menggunakan jalur tersebut sebagai jalur utama distribusi ekspor minyak mereka ke seluruh dunia. Akan tetapi bagi Iran hal ini adalah salah satu latihan rutin dan sekaligus memperlihatkan eksistensi mereka bahwa Iran tidak akan takluk dan takut pada tekanan asing yang mereka sebut sebagai “kolonialis” yang hendak mengacaukan keamanan di Selat Hormuz. Iran justru memandang bahwa mereka akan memberikan rasa aman dan pengawalan terhadap Selat Hormuz khususnya kepada negara-negara Teluk dari gangguan para kolonialisme.

B. Strategi Akomodatif

Permasalahan program nuklir Iran menjadi permasalahan yang cukup menguras tenaga bagi pemerintahan Iran untuk segera menyelesaikannya. Upaya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Mohammad Ahmadinejad dalam mengurangi dampak buruk yang diterima Iran pasca diberlakukannya embargo minyak oleh Amerika Serikat. Namun, gaya pemerintahan Ahmadinejad yang

cenderung keras mungkin menjadi faktor kurang berhasilnya membuat situasi perekonomian Iran membaik. Seperti yang diketahui bahwa Ahmadinejad sangat kontra negara-negara Barat dan perpolitikan ala Barat. Aspek yang menjadi sorotan dunia internasional saat pemerintahan Ahmadinejad adalah bagaimana nuklir menjadi permasalahan yang buruk dalam hubungan diplomatiknya dengan dijatuhkannya banyak sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran. Sehingga situasi ekonomi Iran pada pemerintahan Ahmadinejad banyak sekali mendapat permasalahan dalam perjalanannya.

Berbeda dengan pemerintahan baru Hassan Rouhani, merupakan seorang Doktor Hukum lulusan Glasgow Caledonian University, yang terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran pada pemilu 14 Juni 2013 (Iran Indonesia Radio, 2013). Rouhani memiliki sifat yang santun dan tenang dalam mengeluarkan kebijakannya juga lebih moderat dibandingkan pemimpin sebelumnya Ahmadinejad. Sehingga pada pemerintahan Rouhani ini dapat membuat situasi antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya lebih stabil dan mengurangi tekanan dari pihak Barat.

Upaya diplomasi pada pemerintahan Rouhani sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Rouhani lebih akomodatif dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama. Setelah Rouhani terpilih menjadi Presiden Iran, terdapat banyak perubahan yang luar biasa, itu semua bisa dilihat dari gaya dan karakteristik diplomasi Iran yang diusung olehnya. Hassan Rouhani membuka diplomasi Iran dengan lebih ramah terhadap dunia internasional. Keefektifan diplomasi yang dilakukan Rouhani ini sangat terlihat ketika melihat

respon anggota sidang umum PBB yang fokus mendengarkan isi pidato yang disampaikan oleh Rouhani dan tidak ada yang meninggalkan ruangan sidang kecuali Israel.

Hassan Rouhani dengan sikapnya yang lemah lembut di setiap penyampaian tujuan politik dalam pidato-pidato nya sehingga tidak memberikan kesan yang memaksa dan menekan apalagi menyinggung negara lain, ia melakukannya secara lebih diplomatis. Namun, Rouhani tidak melupakan dari tujuan para pendahulu nya yaitu dengan tetap menunjukkan sikap Iran yang memosisikan diri kontra terhadap kaum zionisme, khusus nya kepada Israel yang terus menerus menghasut Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya agar tetap menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai bentuk hukuman kepada Iran atas pengembangan program nuklir (Sulaeman, 2013). Sikap Israel ini sangat disayangkan sekali oleh Iran, mereka terus berusaha melakukan tindakan sanksi ekonomi yang cenderung memaksa dan juga menerapkan berbagai kebijakan militer lainnya untuk diterapkan terhadap Iran. Namun, disinilah baiknya Rouhani yang tetap menjaga hubungan baik dengan Israel dengan tidak secara terang-terangan menyinggung, berbeda dengan Ahmadinejad yang secara terang-terangan menyinggung dan sempat ada pernyataan bahwa Israel harus dihapuskan dari peta dunia.

Dalam pidato pertama Hasan Rouhani bulan Agustus 2013, beliau menyatakan akan mengupayakan untuk mempertahankan program nuklir sebagai sumber daya yang dimiliki Iran dan mencabut sanksi-sanksi ekonomi dari Barat. Upaya ini direalisasikannya dengan menunjuk Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif untuk segera mengadakan diplomasi dengan negara P5+1. Tentunya, hal ini

dalam upaya Iran mengatasi permasalahan sanksi embargo minyak oleh Amerika Serikat, pemerintahan Rouhani lebih menekankan pada strategi akomodatif dengan melakukan pendekatan ke negara-negara *poliferasi* (P5+1).

Posisi strategis diplomatik Iran dibawah Menlu Jawad Zarif, pada bulan September Iran berupaya untuk melaksanakan sebuah dialog internasional yang dilakukan melalui PBB sebagai wadah pertemuan internasional di kantor PBB New York dengan sasaran pada negara-negara P5+1 yaitu meliputi negara Amerika Serikat, Jerman, China, Prancis, Inggris, dan Rusia serta negara-negara yang memiliki posisi sama dalam pemanfaat nuklir dalam tujuan damai.

Di sela-sela pertemuan tersebut, Zarif juga melakukan pertemuan secara pribadi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John F. Kerry, pertemuan keduanya menjadi pertemuan pertama di level tertinggi semenjak 30 tahun terakhir. Kemudian, diwaktu yang bersamaan Rouhani juga melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika melalui telepon saat perundingan sedang berlangsung. Perundingan yang dipimpin oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton menjadi langkah pertama yang positif dalam menyelesaikan sengketa dan mengakhiri kebuntuan sebelumnya yang dimulai dari penolakan Ahmadinejad untuk menghentikan pengayaan uraniumnya sebagai pertukaran bagi pencabutan sanksi. Para diplomat tersebut sepakat untuk melanjutkan perundingan di Jenewa, Swiss tanggal 15-16 Oktober.

Perundingan itu dilaksanakan beberapa kali sehingga baru mendapatkan kesepakatan. Tidak berhenti pada perundingan sebelumnya, perundingan kedua dilanjutkan kembali. Namun pada pertemuan kedua itu masih memberikan

kekecewaan karena belum terjadinya kesepakatan yang diharapkan terkait program nuklir Iran setelah dilakukan perundingan tiga hari secara intensif. Iran masih bersikeras untuk mendapatkan pengakuan mengenai hak pengayaan nuklirnya seperti yang tercantum dalam NPT. Sedangkan negara P5+1 masih memiliki pemahaman apabila Iran diberikan pengakuan akan hak pengayaan uranium, maka seiring berjalannya waktu Iran pasti akan mencoba untuk membuat teknologi yang berhubungan dengan pengadaan senjata nuklir. Tentunya ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara yang tergabung dalam P5+1.

Perundingan kedua di Jenewa memang memungkinkan untuk lanjut ke tahapan selanjutnya namun masih belum berhasil mencapai kesepakatan bersama karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum dapat diselesaikan. Perundingan yang terjadi selama 11 hari itu juga membahas soal reformasi ekonomi yang harus dilakukan pemerintah Iran dan berakhir dengan kegagalan, bahkan kegagalan perundingan tersebut berdampak pada naiknya harga minyak di pasar dunia yang semakin membuat terpuruknya situasi perekonomian serta menempatkan Iran dalam posisi yang semakin merugikan. Sebelumnya pada tahun 2011 dimana nilai mata uang Iran yang sangat jatuh sehingga menyebabkan harga-harga bahan pokok yang melonjak tinggi dan angka pengangguran di Iran mencapai 3,5 juta jiwa (Probo, 2013). Walaupun begitu, perundingan Iran dan negara P5+1 mendekati kesepakatan dan dilanjutkan pada tanggal 20 November.

Berlanjut pada perundingan ketiga, dalam perundingan ini dihadiri semua menteri Luar Negeri dari Negara-negara P5+1 yakni John F. Kerry (Amerika Serikat), Guido Westerwelle (Jerman), Laurent Fabius (Perancis), William Hage

(Inggris), Sergei Lavrov (Rusia), dan Wang Yi (Cina) telah hadir dan melanjutkan lebih mendalam pembahasan mengenai soal kebuntuan yang belum terpecahkan yang terjadi pada perundingan sebelumnya. Iran yang diwakili oleh Mohammed Zarif memberikan usulan untuk melakukan pembekuan di sebagian program nuklir Iran dengan kompensasi pencabutan beberapa sanksi ekonomi terhadap negaranya. Zarif berusaha untuk menyamakan persepsinya bahwa nuklir yang dikembangkan negaranya ini sama sekali tidak ada tujuan untuk sebagai ancaman dunia tapi ditujukan untuk kepentingan damai (Indonesia Islam Times, 2012). Tidak seperti apa yang sudah dituduhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Pertemuan yang terjadi selama 5 hari itu akhirnya menghasilkan kesepakatan antara Iran dengan negara P5+1 tanggal 24 November. Dalam kesepakatan tersebut, Iran menjanjikan dua hal kepada negara P5+1, antara lain:

- a. Iran berjanji akan mengurangi dan mentralkan cadangan uranium mencapai 20 persen tidak akan memperkaya uranium melebihi 5 persen selama 6 bulan kesepakatan
- b. Iran akan membantu mempermudah IAEA dengan memberikan informasi terkait program nuklirnya. Penyediaan informasi akan diberikan Iran dalam waktu 3 bulan setelah kesepakatan ditandatangani.

Upaya diplomatik dari Zarif dan Rouhani terbukti signifikan yang memiliki kesamaan dalam upaya diplomasi nuklir Iran. Rouhani telah berhasil memperjuangkan hak-hak dalam pengembangan teknologi nuklir Iran dan menurunkan sanksi ekonomi diberlakukan kepada Iran yang diberikan oleh negara-negara P5+1 melalui *Joint of Action of Geneva Interim Agreement on Iran*

Nuclear Program pada tanggal 20 November 2013, setelah sebelumnya pernah dilakukan negosiasi di tanggal 7 dan 8 November 2013 di Janewa.

Hassan Rouhani telah menunjukkan jalur politik nya yang lebih transparansi setelah adanya negosiasi Iran dengan kelompok P5+1. Negosiasi dilakukan untuk mencapai penyelesaian dalam konflik program nuklir oleh badan hukum Internasional, baik melalui MOU maupun perjanjian bilateral antara negara bersangkutan. Rouhani juga akan lebih melakukan transparansi terhadap program nuklir Iran untuk mendapat kepercayaan dari dunia Internasioal (Tim Redaksi Deutsche Welle , 2013).

Perundingan yang dilakukan oleh Hassan Rouhani di Janewa tahun 2013 menghasilkan *Interim Agreement* (Iran menerima bantuan dana dan cadangan devisa yang telah diblokir oleh Amerika Serikat), tentu itu semua menjadi titik tengah dari upaya penyelesaian sengketa nuklir. Iran menginginkan perdamaian terhadap negara-negara Barat terutama Amerika Serikat tanpa adanya peperangan dan persaingan. Isi *Interim Agreement* antara lain perjanjian untuk memperbaiki hubungan diplomatik Iran dan Amerika Serikat. Duta besar Iran untuk PBB Mohammad Khazaei juga menyatakan kebuntuan dalam permasalahan nuklir ini akan segera cepat teratasi jika enam negara yang terlibat (P5+1) dalam negosiasi ini memiliki kemauan politik yang sama dengan Iran untuk menghilangkan ambiguitas (Tim Redaksi Islam Times, 2013).

Dengan keluarnya hasil pencabutan sejumlah sanksi yang diterima Iran ini tentu membuat kondisi perekonomian Iran bisa semakin membaik. Perekonomian yang sempat lumpuh terus bangkin dibuktikan dengan tetap bisa mealkukan

penambahan stok uraniumnya meskipun tidak lebih dari 5 persen selama 6 bulan setelah kesepakatan disetujui. Berkurangnya tekanan-tekanan dari berbagai pihak menjadi keuntungan sendiri bagi Iran. Meskipun, ada beberapa syarat yang harus dijalankan oleh Iran terkait dengan perjanjian ini, diantaranya : program nuklir Iran harus tetap diawasi secara ketat oleh komunitas internasional, Iran harus menghentikan pengayaan uranium, dikurangnya stok bahan nuklir dan juga ditutupnya program nuklir Iran yang ada di wilayah Arak (Anggoro, 2013). Sebagai timbal balik kepada Iran, sanksi ekonomi yang dahulu pernah ditetapkan akan diganti rugi sebanyak US\$ 7 Miliar dan jaminan tidak akan dijatukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran (Revise, 2013).

Perjanjian interim ini hanya berlangsung pada 6 bulan terakhir ini untuk melihat perkembangan dari program nuklir Iran pada dinamika internasional. Iran mendapatkan beberapa izin dari perjanjian ini yaitu sanksi pada sektor *auto-industry* dan izin instalasi suku cadang keamanan penerbangan sipil Iran serta menanggulangi sanksi penjualan minyak Iran dan jasa transportasinya, pemberian lisensi pada sektor penerbangan, impor suku cadang mobil, mesin dan logam mulia (Albright, 2013).

Dari hasil kesepakatan-kesepakatan diatas merupakan tujuan dari Iran untuk mengatasi situasi perekonomiannya yang terganggu sejak diberlakukannya sanksi embargo minyak oleh Amerika Serikat. Dengan strategi yang dilakukan ini Iran mencoba untuk mematuhi keinginan dari Amerika Serikat tanpa menghilangkan tujuan Iran sendiri. Sehingga disini posisi kedua Negara saling menguntungkan dengan kesepakatan terkait program nuklir Iran tersebut.